

AFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU(LIST OF NEW LAWS AND REGULATIONS) Juli 2025

Jenis Peraturan / Types of Regulation	Nomor / Number	Judul	Title
PERIODE II BULAN JULI 2025 (SECOND PERIOD OF JULY 2025)			
RUU		ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN	New and Renewable Energy
		PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN	Third Amendment to Law Number 30 of 2009 on Electricity
INPRES	11 Tahun 2025	PERCEPATAN PENINGKATAN KONEKTIVITAS JALAN DAERAH UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN DAN ENERGI	Acceleration of Increasing Regional Road Connectivity to Support Food and Energy Self-Sufficiency
	10 Tahun 2025	PENGADAAN DAN PENGELOLAAN JAGUNG DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH	Procurement and Management of Domestic Corn and Distribution of Government Corn Reserves
PERMEN KEUANGAN	49/2025	TATA CARA PINJAMAN DALAM RANGKA PENDANAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH	Procedures for Loans in the Framework of Funding for Red and White Village/Sub-District Cooperatives
	48/2025	INVESTASI PEMERINTAH PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM PENGADAAN CADANGAN JAGUNG PEMERINTAH	Government Investment in Bulog Public Companies (Perum) in the Procurement of Government Corn Reserves
	43/2025	PENGASURANSIAN BARANG MILIK NEGARA	State Property Insurance
	37/2025	PENUNJUKAN PIHAK LAIN SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PEDAGANG DALAM NEGERI DENGAN MEKANISME PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK	Appointment of Other Parties as Collectors of Income Tax and Procedures for Collection, Deposit, and Reporting of Income Tax Collected by Other Parties on Income Received or Obtained by Domestic Traders with Trading Mechanisms through Electronic Systems
PERMEN PERHUBUNGAN	PM 7/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN	The Amendment to Regulation of the Minister of Transportation Number PM 87 of 2021 on Civil Aviation Safety Regulations Part 69 concerning License, Rating, Training, and Skills of Aviation Navigation Personnel
PERMEN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	11 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SERTA PERSYARATAN KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH	The Amendment to Regulation of the Minister of Housing and Settlement Number 5 of 2025 on the Amount of Income and Criteria for Low-Income Communities and Requirements for Ease of Construction and Acquisition of Houses
	10 Tahun 2025	PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS	Implementation of Housing Development Assistance and Provision of Special Houses
	9 Tahun 2025	KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	Facilitation and Assistance for Housing Financing for Low-Income Communities
	8 Tahun 2025	PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	The Handling of Reporting of Alleged Violations Through the Whistleblowing System at the Ministry of Housing and Settlement
PERMEN PPN/KEPALA BAPENAS	5 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGAJUAN, DAN PENILAIAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DENGAN PINJAMAN DALAM NEGERI	The Amendment to Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency Number 1 of 2009 on Procedures for Planning, Submission, and Evaluation of Activities Financed by Domestic Loans
PERMEN PARIWISATA	4 Tahun 2025	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PARIWISATA TAHUN 2025-2029	Master Plan for the Development of Indonesian National Work Competency Standards for the Tourism Sector in 2025-2029
	3 Tahun 2025	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA	Public Information Services within the Ministry of Tourism
	2 Tahun 2025	SATU DATA BIDANG PARIWISATA	One Data in the Tourism Sector
PERMEN TRANSMIGRASI	8 Tahun 2025	TRANSFORMASI TRANSMIGRASI	Transformation of Transmigration
PERMEN SOSIAL	7 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT	Organization and Work Procedure of Rural School
	6 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL	The Amendment to Regulation of the Minister of Social Affairs Number 2 of 2025 on Organization and Work Procedures of the Ministry of Social Affairs
PERMEN SEKRETARIS NEGARA	5 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS	Organization and Work Procedure of the Secretariat of Development Control and Special Investigation Agency
PERMEN PERTANIAN	19/2025	PERSYARATAN PEMASUKAN PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN	Requirements for the Entry of Animal Products in Certain Matters Originating from a Country or Zone in a Country of Origin of Entry
PERMEN P2MI/ BPPMI	14/2025	PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Implementation of Public Information Services within the Ministry of Indonesian Migrant Workers Protection/Indonesian Migrant Workers Protection Agency
	13/2025	PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Submission of Wealth Report of State Apparatuses within the Ministry of Indonesian Migrant Workers Protection/Indonesian Migrant Workers Protection Agency

	12 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Implementation of Competency Assessment of State Civil Apparatuses in the Ministry of Indonesian Migrant Workers Protection/Indonesian Migrant Workers Protection Agency
	11 Tahun 2025	PENANGANAN PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	The Handling of Reporting of Alleged Violations Through the Whistleblowing System Within the Ministry of Indonesian Migrant Workers Protection/Indonesian Migrant Workers Protection Agency
	10 Tahun 2025	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Competency Development of Human Resources in the Ministry of Indonesian Migrant Workers Protection/Indonesian Migrant Worker Protection Agency
	9 Tahun 2025	PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA	Increasing Financial Literacy for Indonesian Migrant Workers and Families of Indonesian Migrant Workers
PERMEN KETENAGAKERJAAN	7 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBAYARAN DANA IURAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN OLEH PEMERINTAH	The Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 20 of 2022 on Guidelines for the Disbursement of Contribution Funds to Participants of the Job Loss Guarantee Program by the Government
PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12 Tahun 2025	PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI NEGARA LAIN	Handling of Indonesian Fishermen Caught Overseas for Unlicensed Fishing in Other Countries
PERMEN ESDM	15/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	The Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 2 of 2022 on Organization and Work Procedure of Special Work Units That Implement Upstream Oil and Gas Business Activities
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	13/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG KURIKULUM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH	The Amendment to Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 12 of 2024 on Curriculum in Early Childhood Education, Primary Education, and Secondary Education
	12 Tahun 2025	STANDAR ISI PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH	Standards of Content in Early Childhood Education, Primary Education, and Secondary Education
PERMEN AGAMA	10 Tahun 2025	SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA	Selection of Prospective Members of the National Amil Zakat Agency, Leaders of the Provincial National Amil Zakat Agency, and Leaders of the Regency/City National Amil Zakat Agency
KEPMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	KEP.39/M.PPN/HK/07/2025	PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) PEMENUHAN GIZI NASIONAL	Determination of the Organizational Structure of the Center of Excellence for National Nutrition Fulfillment
	KEP.38/M.PPN/HK/07/2025	DAFTAR OBJEK MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL LINTAS SEKTOR DAN UNIT PEMILIK RISIKO LINTAS SEKTOR RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 DAN TAHUN 2026	Risk Management of Cross-Sector National Development and Cross-Sectoral Risk Owner Units of Government Work Plan for 2025 and 2026
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	40/2025	PELABUHAN TEMPAT PELAKSANAAN PORT STATE MEASURES	Ports for Implementation of Port State Measures
KEPMEN KESEHATAN	HK.01.07/MENKES/730/2025	NILAI KLAIM HARGA OBAT PROGRAM RUJUK BALIK, OBAT PENYAKIT KRONIS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUT, OBAT KEMOTERAPI, DAN OBAT ALTEPLASE	Value of Drug Price Claims for Referral Programs, Chronic Disease Drugs at Advanced Healthcare Service Facilities, Chemotherapy Drugs, and Alteplase Drugs
KEPMEN ESDM	244.K/MB.01/MEM.B/2025	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN JULI TAHUN 2025	Metal Mineral Reference Price and Coal Reference Price for the Second Period of July 2025
	223.K/TL.04/MEM.L/2025	BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2025	Amount of Service Quality Level of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) in 2025
KEPMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	95/M/2025	PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK	Guidelines for the Implementation of Academic Ability Tests
	82/O/2025	MEKANISME REDISTRIBUSI GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	Redistribution Mechanism of State Civil Apparatus Teachers in Educational Units Organized by the Community
KEPMEN PERDAGANGAN	1640/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	Export Benchmark Prices of Mining Products Subject to Export Duty
KEPMEN KEBUDAYAAN	162/M/2025	HARI KEBUDAYAAN	National Cultural Day
KEPMEN PEKERJAAN UMUM	672/KPTS/M/2025	PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARAN TARIF TOL JALAN TOL PEKANBARU-PADANG SEKSI SICINCIN-PADANG	Determination of Classification of Motorized Vehicle Type and the Amount of Toll Tariff for the Sicincin-Padang Section of Pekanbaru-Padang Toll Road
RANCANGAN KEPMEN KOMDIGI		STANDAR TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERGERAK SELULER BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION DAN STANDAR TEKNOLOGI INTERNATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS-2020	Technical Standard for Telecommunication Equipment and/or Mobile Telecommunication Device Based on Long Term Evolution Technology Standards and International Mobile Telecommunications Technology Standards-2020
		DAFTAR ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR TEKNIS	List of Telecommunications Devices that will be required to comply with the technical standards
PETUNJUK TEKNIS MENTERI ATR	3/Juknis-HK.02.02/VII/2025	TATA LAKSANA FORUM PENATAAN RUANG DAERAH UNTUK PENERBITAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG	Governance of the Regional Spatial Planning Forum for Issuance of Spatial Utilization Activities Suitability
SE MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	10 Tahun 2025	PELAKSANAAN KEGIATAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN AJARAN 2025/2026	Implementation of Orientation Period Activities in a Child-Friendly Educational Units for Early Childhood Education, Elementary Education, and Secondary Education for the 2025/2026 Academic Year
SE BERSAMA MENTERI DIKDASMEN DAN KEPALA BKN	9; 5/2025	PENGANGKATAN/PENUGASAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	Appointment/Assignment, Transfer, and Dismissal of Teachers as Principals and Supervisors
SE BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS	100 .2 .4/3207 /SJ; 3 Tahun 2025	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025-2029 PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Development and Supervision of Performance of Regional Heads and Deputy Regional Heads in Implementing National Strategic Programs for 2025-2029 in the Organization of Regional Government
PERATURAN DIRJEN PAJAK	PER-13/PJ/2025	PIAGAM WAJIB PAJAK (TAXPAYERS CHARTER)	Taxpayers Charter

PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN	PER-12/PB/2025	PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN	<i>Determination of Service Tariff Zones for Public Service Agencies in the Field of Public Health Laboratories at the Ministry of Health</i>
	PER-10/PB/2025	PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	<i>Determination of Service Tariff Zones for Public Service Agencies of State Universities at the Ministry of Higher Education, Science, and Technology</i>
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	PER-8/BC/2025	TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN	<i>The Governance of Exports of Consignment Goods</i>
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 376/2025	PENETAPAN NOMOR, KELAS, DAN LOKASI PENEMPATAN KAPAL NEGARA PATROLI KESATUAN PENGAWASAN LAUT DAN PELAYARAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	<i>Determination of Number, Class, and Location for the Placement of State Patrol Vessels of the Marine and Shipping Supervision Unit within the Directorate General of Sea Transportation</i>
	A.796/ AL.308/DJPL	PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN SURAT KETERANGAN TANPA DIPANDU (PILOT EXEMPTION) BAGI NAKHODA YANG MENGOPERASIKAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN	<i>Technical Guidelines for the Implementation of Pilot Exemption Certificate for Captain Operating the Ferry Transport Vessel</i>
KEPUTUSAN DIRJEN BADAN PERADILAN AGAMA	932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025	PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERBITAN SALINAN PUTUSAN DAN AKTA CERAI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK	<i>Guidelines for the Administration of Issuance of Copies of Decisions and Deeds of Divorce Within Religious Courts Electronically</i>
SE DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA	SE-DJPU 11/2025	PEDOMAN PENERBITAN PAS BANDAR UDARA UNTUK PETUGAS PROTOKOLER (PERWAKILAN INSTANSI/ENTITAS)	<i>Guidelines for the Issuance of Airport Pass for Protocol Officers (Agency/Entity Representatives)</i>
SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	SE-DJPL 21/2025	KEWAJIBAN PELAKSANAAN PENGEDOKAN SESUAI JADWAL UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN	<i>Mandatory Docking Implementation According to Schedule for Ferry Transport Vessels</i>
SE DIRJEN AHU	AHU-AH.01.04-01/2025	PERCEPATAN PENGESAHAN PENDIRIAN DAN PERUSAHAN ANGGARAN DASAR SADAN HUKUM YAYASAN YANG BERGERAK DALAM KEGIATAN MAKAN BERGIZI GRATIS	<i>Acceleration of Ratification of the Establishment and Amendment of the Articles of Association of the Legal Entity Foundation Engaged in Free Nutritious Meals Program</i>
PERATURAN BPHMIGAS	2 Tahun 2025	PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA PT PERTAMINA GAS RUAS TRANSMISI LOOPING GRESIK-PKG GRESIK	<i>Revocation of Regulation of Downstream Oil and Gas Regulatory Agency Number 1 of 2021 on Tariffs for Transportation of Natural Gas Through PT Pertamina Gas Pipeline, Gresik-PKG Gresik Looping Transmission Section</i>
PERATURAN BNPP	6 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	<i>The Amendment to Regulation of the National Search and Rescue Agency Number 6 of 2021 on Standard Operating Procedures for Government Administration within the National Search and Rescue Agency</i>
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL	3 Tahun 2025	STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL	<i>Public Information Service Standards in the National Nutrition Agency</i>
PERATURAN BPKP	4 Tahun 2025	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN NEGARA SERTA BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEWA SATUAN RUMAH SUSUN PADA RUMAH SUSUN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Management of State Multistory Housing as well as the Amount, Requirements, and Procedures for Imposing Tariffs Up to Zero Rupiah or Zero Percent on Types of Non-Tax State Revenues for Multistory Housing Units in State Multistory Housing within the Financial and Development Supervisory Agency</i>
PERATURAN BPOM	17/2025	PEDOMAN PENILAIAN PRODUK SUPLEMEN KESEHATAN MENGANDUNG PROBIOTIK	<i>Guidelines for Examination of Health Supplement Products Containing Probiotics</i>
RANCANGAN PERATURAN BPOM		KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT BAHAN ALAM	<i>Criteria and Procedures for Natural Substance Drug Registration</i>
PERATURAN BRIN	11 Tahun 2025	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET PERTANIAN DAN PANGAN	<i>Duties, Functions, and Organizational Structure of Agriculture and Food Research</i>
	10 Tahun 2025	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET NANOTEKNOLOGI DAN MATERIAL	<i>Duties, Functions, and Organizational Structure of Nanotechnology and Materials Research</i>
	9 Tahun 2025	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET HAYATI DAN LINGKUNGAN	<i>Duties, Functions, and Organizational Structure of Biological and Environmental Research</i>
	8 Tahun 2025	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET KEBUMIHAN DAN MARITIM	<i>Duties, Functions, and Organizational Structure of Land and Maritime Research</i>
	7 Tahun 2025	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RISET ENERGI DAN MANUFAKTUR	<i>Duties, Functions, and Organizational Structure of Energy and Manufacturing Research</i>
	6 Tahun 2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	<i>The Amendment to Regulation of the National Research and Innovation Agency Number 38 of 2022 on the Occupancy of State Houses within the National Research and Innovation Agency</i>
PERATURAN KEJAKSAAN	2 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN PENILAIAN KOMPETENSI DAN POTENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	<i>Implementation of Competency and Potential Assessment of State Civil Apparatus within the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia</i>
PERATURAN KEPALA OTORITA IKN	5 Tahun 2025	PAKAIAN DINAS PEGAWAI OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	<i>Official Uniform for Officers of the Nusantara Capital City Authority</i>
	4 Tahun 2025	GARIS SEMPADAN BANGUNAN PADA JALAN SEPAKU RAYA	<i>Building Boundary Line on Sepaku Raya Road</i>
PERATURAN KOMNAS HAM	3 Tahun 2025	PENGELOLAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	<i>Management of Cooperation within the National Human Rights Commission</i>
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5 Tahun 2025	PENGAKUAN PEMBELAJARAN	<i>Learning Acknowledgement</i>
	4 Tahun 2025	KONTEN PEMBELAJARAN	<i>Learning Content</i>
	3 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PEMETAAN KOMPETENSI	<i>Organization and Work Procedure of Competency Mapping Service Center</i>
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	15/2025	PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI	<i>Mutual Fund Assessment And Investment Manager Assessment</i>
	14/2025	PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI, DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK SECARA ELEKTRONIK	<i>Implementation of the General Meeting of Shareholders, General Meeting of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders Electronically</i>
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS	<i>Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts whose Participating Units are Traded on the Stock Exchange with Underlying Assets in the Form of Gold</i>
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	15/2025	PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PIHAK YANG DIATUR DAN DIAWASI OLEH BANK INDONESIA	<i>Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for Proliferation of Mass Destruction Weapons for Parties Regulated and Supervised by Bank Indonesia</i>

PEDOMAN TATA KERJA SKK MIGAS	PTK-017/SKKIA0000/2025/S9	HUBUNGAN MASYARAKAT BUKU KETIGA TENTANG PELIBATAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT REVISL-02	Third Book Public Relations on Revision of Community Engagement and Development-02
	PTK-023/SKKIA0000/2025/S9	PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGELOLAAN BAGIAN WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Implementation of Cooperation on the Management of the Working Area for Increasing Oil and Gas Production
KEPUTUSAN DIREKSI PT KSEI	KEP-0023/DIR/KSEI/0725	PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION (SID) BAGI NASABAH DERIVATIF KEUANGAN	Enforcement of the Use of Single Investor Identification (SID) for Financial Derivatives Customers
KEPUTUSAN KEPALA LKPP	93/2025	PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK MELALUI METODE MINI-KOMPETISI	Implementation of E-Purchasing of Electronic Catalog Through Mini-Competition Method
	90/2025	KODE ETIK PEGAWAI UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	Code of Ethics for Employees of Goods/Services Procurement Work Unit at the Government Goods/Services Procurement Policy Agency
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN	16/SEOJK.07/2025	PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL	Implementation of Anti-Money Laundering, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for Proliferation of Mass Destruction Weapons Programs for Digital Financial Asset Traders
	15/SEOJK.03/2025	PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH	Implementation of Governance for Sharia Rural Banks
RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN		PENYELENGGARAAN PROGRAM BANK WAKAF MIKRO OLEH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH	Implementation of Micro Waqf Bank Program by Sharia Microfinance Institutions
		PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/SEOJK.05/2019 TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH	The Amendment to Circular of the Financial Services Authority Number 25/SEOJK.05/2019 on Monthly Reports of Venture Capital Company and Sharia Venture Capital Company
PERIODE I BULAN JULI 2025 (FIRST PERIOD OF JULY 2025)			
PP	30/2025	PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SERTA PENANGANAN, PELINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	Prevention of Sexual Violence Crimes and the Handling, Protection, and Recovery of Victims of Sexual Violence Crimes
	29/2025	DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	Assistance Funds for Victims of Sexual Violence Crimes
PERPRES	73/2025	TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KARANTINA INDONESIA	Performance Allowances for Employees of the Indonesian Quarantine Agency
	72/2025	STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL	Regional Unit Price Standards
	68/2025	SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI	Tax Collection System for Foreign Digital Transactions
PERMEN PERTANIAN	17/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENAMAAN DAN PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN	The Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 29 of 2021 on the Naming and Registration of Plant Varieties
PERMEN PERDAGANGAN	26/2025	PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI	The Revocation of 4 (Four) Regulations of the Minister of Trade in the Domestic Trade Sector
	25/2025	TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA OLEH PEMERINTAH DAERAH	Procedures for the Issuance of Franchise Registration Certificates by Regional Governments
	24/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG DALAM KEADAAN TIDAK BARU DAN LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	Policies and Regulations for Imports of Used Goods and Non-Hazardous and Non-Toxic Waste
	23/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI	Policies and Regulations for Imports of Consumer Goods
	22/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG INDUSTRI TERTENTU	Policies and Regulations for Imports of Certain Industrial Goods
	21/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG ELEKTRONIK DAN TELEMATIKA	Policies and Regulations for Imports of Electronic and Telematic Goods
	20/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BAHAN KIMIA, BAHAN BERBAHAYA, DAN BAHAN TAMBANG	Policies and Regulations for Imports of Chemicals, Hazardous Materials, and Mining Materials
	19/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR GARAM DAN KOMODITAS PERIKANAN	Policies and Regulations for Imports of Salt and Fishery Commodities
	18/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Policies and Regulations for Imports of Agricultural and Livestock Goods
	17/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	Policies and Regulations for Imports of Textiles and Textile Products
	16/2025	KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR	Import Policies and Regulations
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	11 Tahun 2025	PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU	Fulfillment of Teachers Workloads
PERMEN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	9 Tahun 2025	PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU ATAU PEMEGANG IZIN TINGGAL TERTENTU DARI SUATU NEGARA YANG DIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN	Addition to the List of Countries, Governments of Special Administrative Regions of a Country, and Certain Entities or Holders of Certain Residence Permits from a Country that are Granted Free Visit Visa
PERMEN KESEHATAN	5 Tahun 2025	PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	The Sixth Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance within the Ministry of Health
PERMEN KETENAGAKERJAAN	6 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI	Guidelines for the Organization of Competency-Based Training
PERMEN KEHUTANAN	12 Tahun 2025	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	Requirements and Procedures for the Imposition of Tariffs on Types of Non-Tax State Revenue in the Field of Natural Resource and Ecosystem Conservation
PERMEN DALAM NEGERI	10 Tahun 2025	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	Guidelines for the Preparation of Regional Government Work Plans for 2026
PERMEN PANRB	9 Tahun 2025	PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	The Revocation of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 19 of 2021 on Service Standards within the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform
PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS	4 Tahun 2025	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025—2029	The Planning and Control of National Strategic Projects for the Implementation of the National Medium-Term Development Plan for 2025—2029

PERMEN EKONOMI KREATIF	4 Tahun 2025	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	Public Information Services within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency
PERMEN KEUANGAN	42/2025	SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	Synergy of Standard Account Charts Between the Central Government and Regional Governments
	41/2025	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA KEMENTERIAN KESEHATAN	Service Tariffs for Public Service Agencies in the Public Health Laboratories Sector at the Ministry of Health
	39/2025	TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DISTRIK NAVIGASI TIPE B TANJUNG PRIOK PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Service Tariffs for Public Service Agencies at the Tanjung Priok Type B Navigation District at the Ministry of Transportation
RANCANGAN PERMEN INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM		PEDOMAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN FASILITAS PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)	Guidelines and Procedures for the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Investment Facilities through the Online Single Submission (OSS) System
KEPMEN KETENAGAKERJAAN	166/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM BIDANG INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI SEMEN	Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Processing Industry Category of the Main Classification of Non-Metal Mineral Products in the Building Materials from Cement Sector
	165/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN, DAN KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU (YBDI) BIDANG BUDI DAYA TEBU DAN PENGOLAHAN GULA KRISTAL PUTIH	Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Agriculture, Forestry, and Fisheries Category of the Main Classification of Crop Farming, Livestock Farming, Hunting, and Related Activities (YBDI) in the Sugarcane Cultivation and White Crystal Sugar Processing Sector
	155/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG REFRAKTORI	Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Professional, Scientific, and Technical Activities Category of the Main Classification of Other Professional, Scientific, and Technical Activities in the Refractory Sector
	154/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM BIDANG INDUSTRI UBIN KERAMIK	Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Manufacturing Industry Category of the Main Classification of Non-Metal Mining Industry in the Ceramic Tile Industry Sector
	153/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS LAINNYA BIDANG MAINTENANCE ALAT BERAT	Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Professional, Scientific, and Technical Activities Category in the Main Classification of Other Professional, Scientific, and Technical Activities in the Heavy Equipment Maintenance Sector
	152/2025	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA	Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Professional, Scientific, and Technical Activities Category in the Main Classification of Central Office and Management Consulting Activities in the Village-Owned Enterprise Management Sector
	151/2025	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 231 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI	The Amendment to Decree of the Minister of Manpower Number 231 of 2024 on the Determination of Indonesian National Work Competency Standards for the Professional, Scientific, and Technical Activities Category in the Main Classification of Central Office and Management Consulting Activities in the Information Technology Audit Sector
KEPMEN PERDAGANGAN	1554/2025	DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG	List of Brands of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein in Branded Packaging and Packaged with a Net Weight of Less than or Equal to 25kg
	1553/2025	HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Reference Price of Crude Palm Oil Subject to Export Duty and Service Tariffs of the General Service Agency of the Palm Oil Plantation Fund Management Agency
	1552/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	Export Benchmark Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duty
	1551/2025	HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	Export Benchmark Prices for Mining Products Subject to Export Duty
	1528/2025	PENETAPAN PERSENTASE HAK EKSPOR KRATOM PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025	Determination of the Export Quota Percentage for Kratom for the Period of July to December 2025
KEPMEN ESDM	229.K/MG.03/MEM.M/2025	HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JUNI 2025	Indonesian Crude Oil Price for June 2025
	217.K/MB.01/MEM.B/2025	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN JULI TAHUN 2025	Reference Metal Mineral Price and Reference Coal Price for the First Period of July 2025
KEPMEN PERINDUSTRIAN	2585/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PIPA BAJA SALURAN AIR DAN INSTALASI GAS SECARA WAJIB	Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Waterway Steel Pipes and Gas Installation
	2584/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK LUMAS KENDARAAN BERMOTOR SECARA WAJIB	Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Motor Vehicle Lubricating Oil
	2583/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK ELEKTRONIKA RUMAH TANGGA SECARA WAJIB	Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Household Electronics
	2582/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAN SECARA WAJIB	Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Tires
	2581/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KERTAS DAN KARTON SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN KEMASAN PRIMER UNTUK PANGAN SECARA WAJIB	Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Paper and Cardboard as Raw Materials for the Manufacture of Primary Packaginq for Food

	2580/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB	<i>Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Palm Cooking Oil</i>
	2579/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK GULA KRISTAL SECARA WAJIB	<i>Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Crystal Sugar</i>
	2578/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KOPI INSTAN SECARA WAJIB	<i>Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Instant Coffee</i>
	2577/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAKAO BUBUK SECARA WAJIB	<i>Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Cocoa Powder</i>
	2576/2025	PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK PUPUK NITROGEN , FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA WAJIB	<i>Appointment of Conformity Assessment Agency for the Mandatory Implementation of the Indonesian National Standards for Solid Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Fertilizer</i>
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	34/2025	KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH PATANI-BICOLI DAN PULAU SAYAFI PROVINSI MALUKU UTARA	<i>Conservation areas in the Waters of the Patani-Bicoli region and Sayafi Island in North Maluku Province</i>
KEPMEN PEKERJAAN UMUM	628/KPTS/M/2025	DESAIN PROTOTYPE/PURWARUPA BANGUNAN GEDUNG SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI	<i>Prototype Design for the Buildings of Nutrition Fulfillment Service Units</i>
PERATURAN DIRJEN INFRASTRUKTUR DIGITAL	1 Tahun 2025	PENCABUTAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	<i>Revocation of Technical Requirements for Telecommunications Equipment and/or Telecommunications Devices</i>
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 365/2025	PEDOMAN TAMBAHAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 7 TAHUN 2024 TENTANG HARMONISASI SISTEM PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI PADA KAPAL BERBENDERA INDONESIA	<i>Additional Guidelines on the Implementation of Regulation of the Minister of Transportation Number PM 7 of 2024 on the Harmonization of Inspection and Certification Systems for Indonesian-Flagged Vessels</i>
	KP-DJPL 359/2025	PENUNJUKAN KOORDINATOR WILAYAH DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	<i>Appointment of Regional Coordinators for Law Enforcement in Technical Implementation Units within the Directorate-General of Marine Transportation</i>
	KP-DJPL 358/2025	KEWAJIBAN SERTIFIKASI TONGKANG BERBENDERA INDONESIA YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA UNTUK MENGANGKUT BIJIH NIKEL (NICKEL ORE)	<i>Mandatory Certification for Indonesian-Flagged Barges Sailing in Indonesian Waters to Transport Nickel Ore</i>
	KP-DJPL 350/2025	PEDOMAN TEKNIS PENERBITAN DOKUMEN KESELAMATAN PENGAWAKAN MINIMUM (MINIMUM SAFEMANNING DOCUMENT)	<i>Technical Guidelines for the Issuance of Minimum Safemanning Documents</i>
KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	KEP-116/BC/2025	PENETAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUAPULUHSATU	<i>Mandatory Implementation of CEISA 4.0 Phase Twenty-One</i>
SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	SE-DJPL 19/2025	REKONSILIASI REALISASI INVESTASI ATAS PERJANJIAN YANG MEMENUHI KARAKTERISTIK KONSESI JASA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT	<i>Reconciliation of Investment Realization under Agreements that Meet the Characteristics of Service Concessions within the Directorate-General of Marine Transportation</i>
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL	5 Tahun 2025	PENGELOLAAN SISTEM DISTRIBUSI PANGAN	<i>Management of Food Distribution System</i>
PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA	9 Tahun 2025	TINDAKAN KARANTINA HEWAN PENGAMANAN MAKSIMAL	<i>Maximum Security Animal Quarantine Measures</i>
PERATURAN BAPPEBTI	3 Tahun 2025	TATA CARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK EMAS SECARA DIGITAL DI BURSA BERJANGKA	<i>Procedures for the Digital Implementation of Physical Gold Trading on the Futures Exchange</i>
PERATURAN BANPT	14/2025	SYARAT PERLU PADA INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL	<i>Requirements for Program Accreditation Instruments to Obtain Accredited Status and Excellent Accredited Status</i>
	13/2025	INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PEROLEHAN STATUS TERAKREDITASI SEMENTARA, STATUS TERAKREDITASI, DAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL	<i>Program Accreditation Instruments to Obtain Temporary Accredited Status, Accredited Status, and Excellent Accredited Status</i>
PERATURAN BPOM	21/2025	PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	<i>Revocation of Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 29 of 2022 on Positions and Job Classes within the National Agency of Drug and Food Control, as amended several times, most recently by Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 13 of 2024 on the Second Amendment to Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 29 of 2022 on Positions and Job Classes within the National Agency of Drug and Food Control</i>
	20/2025	STANDAR CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK	<i>Standards for Good Drug Distribution Practices</i>
	19/2025	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN OBAT, BAHAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	<i>The Amendment to Regulation of the National Agency of Drug and Food Control Number 9 of 2024 on Guidelines for the Follow-up on the Results of Supervision of Drugs, Drug Ingredients, Narcotics, Psychotropics, Precursors, and Addictive Substances</i>
	18/2025	PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU DAN ROKOK ELEKTRONIK	<i>Supervision of Tobacco Products and Electronic Cigarettes</i>
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL	3 Tahun 2025	PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM	<i>Supervision and Guidance on the Implementation of the Handover and Storage of Printed and Recorded Works</i>
PERATURAN KEPOLISIAN	5 Tahun 2025	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGENGUDI	<i>The Organization of Driving Education and Training</i>
PERATURAN PPATK	6 Tahun 2025	PENCABUTAN PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-02/1.02/PPATK/02/15 TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	<i>Revocation of Regulation of the Head of the Financial Transaction Reporting and Analysis Center Number Per-02/1.02/PPATK/02/15 on Categories of Service Users Potentially Involved in Money Laundering Crimes</i>
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	14/2025	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK INDONESIA-FAST PAYMENT	<i>The Second Amendment to Regulation of the Board of Governors Number 17 of 2023 on the Organization of Bank Indonesia-Fast Payment</i>
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	2 Tahun 2025	PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	<i>Guidelines for the Preparation of Standard Operating Procedures for the Nusantara Capital Authority</i>

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	16/2025	PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN SERTA PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA DI SEKTOR INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN SERTA ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO	<i>Assessment of the Capability and Suitability as well as Reassessment of Key Parties in the Financial Sector of Technology Innovation Sector and Digital Financial Assets and Crypto Assets</i>
	13/2025	PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK	<i>Internal Control and Conduct of Securities Companies that Conduct Business Activities as Underwriters of Securities and Securities Brokers</i>
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA	<i>Integrity of Financial Reporting of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions</i>
		PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN	<i>Application of Integrated Governance for Financial Conglomerate Holding Companies</i>
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA	2125/2025	FOCAL POINT ORGANISASI PELINDUNGAN TUMBUHAN NASIONAL (NATIONAL PLANT PROTECTION ORGANIZATION)	<i>Focal point for the National Plant Protection Organization</i>
SE SEKRETARIAT UTAMA BADAN KARANTINA INDONESIA	6151/2025	PEDOMAN PEMBERLAKUAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN SECARA TERINTEGRASI	<i>Guidelines for the Enforcement of Regulation of the Indonesian Quarantine Agency Number 14 of 2024 on Procedures for Integrated Quarantine and Supervision Measures</i>
SE OTORITAS JASA KEUANGAN	14/SEOJK.03/2025	PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK UMUM	<i>Application of Governance for Commercial Banks</i>
	13/SEOJK.05/2025	BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI	<i>Form and Structure of Periodic Reports for Insurance Broker Companies, Reinsurance Broker Companies, and Insurance Loss Appraisal Companies</i>
	12/SEOJK.05/2025	SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN	<i>Work Competency Certification for Insurance Companies, Guarantee Institutions, Pension Funds, and Special Institutions in the Insurance, Guarantee, and Pension Funds Sector</i>
	11/SEOJK.05/2025	BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN	<i>Form and Structure of Periodic Reports for Pension Funds</i>
RANCANGAN SE OJK		PROFESI PENUNJANG DI SEKTOR JASA KEUANGAN	<i>Supporting Professions in the Financial Services Sector</i>
		PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK PERUSAHAAN PERGADAIAN	<i>Electronic Licensing, Approval, and Reporting for Pawnshop Companies</i>